BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 45 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan adanya perubahan pada beberapa ketentuan tentang Jabatan Fungsional lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, maka ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang *Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan* Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okupasi Terapis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah, dan Teknisi Gigi;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/12/M.PAN/3/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/9/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor PER.01/MEN/2009 dan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
27. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
28. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80 Tahun 2003 tentang Penyetaraan Jenjang Jabatan bagi PNS Yang Dipekerjakan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
29. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.54/MEN/2011 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;

30. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dengan Kepala Badan Kegawaian Negara Nomor 209/MENKES/SKB/III/2004 dan Nomor 07 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penataan Organisasi dan Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaen Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 14);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 25);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 11);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penataan Organisasi dan Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 6);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 24);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 10);

42. Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penetapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 28) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penetapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 38);

43. Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 35);

44. Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2010 tentang Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 21) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Bandung :

a. Nomor 34 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 34);
b. Nomor 7 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 7);
c. Nomor 45 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 45);
d. Nomor 35 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 35);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15, diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Tambahan penghasilan tidak dibayarkan apabila :

a. telah dijatuhi hukuman disiplin berat;
b. menjalani cuti besar dan/atau cuti untuk memenuhi kewajiban agama, cuti diluar tanggungan negara, dan cuti persalinan;
c. tugas belajar; dan
d. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil.

2. Ketentuan pada Lampiran II, diubah sehingga Lampiran II berbunyi sebagai berikut :

TPP JAFUNG PENGAWAS SEKOLAH KETERAMPILAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
PENGAWAS SEKOLAH TK/SD			
1	MUDA	III/c-III/d	1
2	MADYA	IV/a-IV/b-IV/c	2
3	UTAMA	IV/d-IV/e	3
PENGAWAS SEKOLAH SLTP/SMU			
1	MUDA	III/c-III/d	1
2	MADYA	IV/a-IV/b-IV/c	2
3	UTAMA	IV/D-IV/e	3
PENGAWAS SEKOLAH SLB			
1	MUDA	III/c-III/d	1
2	MADYA	IV/a-IV/b-IV/c	2
3	UTAMA	IV/D-IV/e	3

TPP JAFUNG PENILIK LUAR SEKOLAH KEAHLIAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PERTAMA	III/b	1
2	MUDA	III/c-III/d	2
3	MADYA	IV/a-IV/b-IV/c	3
4	UTAMA	IV/d	4

TPP JAFUNG PAMONG BELAJAR KEAHLIAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PERTAMA	III/a-III/b	1
2	MUDA	III/c-III/d	2
3	MADYA	IV/a-IV/b-IV/c	3

TPP JAFUNG INSTRUKTUR LATIHAN KERJA KETERAMPILAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PELAKSANA	II/b-II/c-II/d	1
2	PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
3	PENYELIA	III/c-III/d	3

TPP JAFUNG INSTRUKTUR LATIHAN KERJA KEAHLIAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PERTAMA	III/a-III/b	1
2	MUDA	III/c-III/d	2
3	MADYA	IV/a-IV/b-IV/c	3

TPP JAFUNG PENGANTAR KERJA KETERAMPILAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PELAKSANA	II/b-II/c-II/d	1
2	PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
3	PENYELIA	III/c-III/d	3

TPP JAFUNG PENGANTAR KERJA KEAHLIAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PERTAMA	III/a-III/b	1
2	MUDA	III/c-III/d	2
3	MADYA	IV/a-IV/b-IV/c	3

TPP JAFUNG PENGAWAS PEKERJAAN KEAHLIAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PERTAMA	III/a-III/b	1
2	MUDA	III/c-III/d	2
3	MADYA	IV/a-IV/b-IV/c	3

TPP JAFUNG HUBUNGAN INDUSTRIAL KEAHLIAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PERTAMA	III/a-III/b	1
2	MUDA	III/c-III/d	2
3	MADYA	IV/a-IV/b-IV/c	3

TPP JAFUNG PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT KETERAMPILAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PELAKSANA PEMULA	II/a	1
2	PELAKSANA	II/b-II/c-II/d	2
3	PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	3
4	PENYELIA	III/c-III/d	4

TPP JAFUNG PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT KEAHLIAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PERTAMA	III/a	1
2	MUDA	III/c	2
3	MADYA	IV/a	3

TPP JAFUNG PENYULUH KB KETERAMPILAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PEMULA	II/a	1
2	PELAKSANA	II/b-II/c-II/d	2
3	PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	3
4	PENYELIA	III/c-III/d	4

TPP JAFUNG PENYULUH KB KEAHLIAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PERTAMA	III/a-III/b	1
2	MUDA	III/c-III/d	2
3	MADYA	IV/a-IV/b-IV/c	3

TPP JAFUNG TEKNISI ELEKTRO MEDIS KETERAMPILAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PELAKSANA	II/b-II/c	1
2	PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
3	PENYELIA	III/c-III/d	3

TPP JAFUNG ANALIS KEPEGAWAIAN KETERAMPILAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PELAKSANA	II/b-II/c-II/d	1
2	PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
3	PENYELIA	III/c-III/d	3

TPP JAFUNG ANALIS KEPEGAWAIAN KEAHLIAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PERTAMA	III/a-III/b	1
2	MUDA	III/c-III/d	2
3	MADYA	IV/a-IV/b-IV/c	3
4	UTAMA	IV/d-IV/e	4

TPP JAFUNG WIDYAISWARA KEAHLIAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PERTAMA	III/a-III/b	1
2	MUDA	III/c-III/d	2
3	MADYA	IV/a-IV/b-IV/c	3
4	UTAMA	IV/d-IV/e	4

TPP JAFUNG ARSIPARIS KETERAMPILAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PELAKSANA	II/b-II/c-II/d	1
2	PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
3	PENYELIA	III/c-III/d	3

TPP JAFUNG ARSIPARIS KEAHLIAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PERTAMA	III/a-III/b	1
2	MUDA	III/c-III/d	2
3	MADYA	IV/a-IV/b-IV/c	3
4	UTAMA	IV/d-IV/e	4

TPP JAFUNG PRANATA KOMPUTER KETERAMPILAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PELAKSANA PEMULA	II/a	1
2	PELAKSANA	II/b-II/c-II/d	2
3	PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	3
4	PENYELIA	III/c-III/d	4

TPP JAFUNG PRANATA KOMPUTER KEAHLIAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PERTAMA	III/a-III/b	1
2	MUDA	III/c-III/d	2
3	MADYA	IV/a-IV/b-IV/c	3
4	UTAMA	IV/d-IV/e	4

TPP JAFUNG PUSTAKAWAN KETERAMPILAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PELAKSANA	II/b-II/c-II/d	1
2	PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
3	PENYELIA	III/c-III/d	3

TPP JAFUNG PUSTAKAWAN KEAHLIAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PERTAMA	III/a-III/b	1
2	MUDA	III/c-III/d	2
3	MADYA	IV/a-IV/b-IV/c	3
4	UTAMA	IV/d-IV/e	4

TPP JAFUNG AUDITOR KETERAMPILAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PELAKSANA	II/b-II/c-II/d	1
2	PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
3	PENYELIA	III/c-III/d	3

TPP JAFUNG AUDITOR KEAHLIAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PERTAMA	III/a-III/b	1
2	MUDA	III/c-III/d	2
3	MADYA	IV/a-IV/b-IV/c	3
4	UTAMA	IV/d-IV/e	4

TPP JAFUNG PENYULUH PERINDAG KETERAMPILAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PELAKSANA	II/b-II/c-II/d	1
2	PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
3	PENYELIA	III/c-III/d	3

TPP JAFUNG PENYULUH PERINDAG KEAHLIAN			
NO	**JENJANG JABATAN *FUNGSIONAL***	**GOLONGAN/ *RUANG***	**KELIPATAN *TPP***
1	PERTAMA	III/a-III/b	1
2	MUDA	III/c-III/d	2
3	MADYA	IV/a-IV/b-IV/c	3

TPP JAFUNG PERANCANG PER-UU KEAHLIAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PERTAMA	III/a-III/b	1
2	MUDA	III/c-III/d	2
3	MADYA	IV/a-IV/b-IV/c	3
4	UTAMA	IV/d-IV/e	4

TPP JAFUNG PRANATA HUMAS KETERAMPILAN			
NO	**JENJANG JABATAN *FUNGSIONAL***	**GOLONGAN/ *RUANG***	**KELIPATAN *TPP***
1	PELAKSANA	II/b-II/c-II/d	1
2	PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
3	PENYELIA	III/c-III/d	3

TPP JAFUNG PRANATA HUMAS KEAHLIAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PERTAMA	III/a-III/b	1
2	MUDA	III/c-III/d	2
3	MADYA	IV/a-IV/b-IV/c	3

TPP JAFUNG PERENCANA KEAHLIAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PERTAMA	III/a-III/b	1
2	MUDA	III/c-III/d	2
3	MADYA	IV/a-IV/b-IV/c	3
4	UTAMA	IV/d-IV/e	4

TPP JAFUNG TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN KETERAMPILAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PELAKSANA	II/b-II/c-II/d	1
2	PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
3	PENYELIA	III/c-III/d	3

TPP JAFUNG TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN KEAHLIAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PERTAMA	III/a-III/b	1
2	MUDA	III/c-III/d	2
3	MADYA	IV/a-IV/b-IV/c	3
4	UTAMA	IV/d-IV/e	4

TPP JAFUNG TEKNIK PENGAIRAN KETERAMPILAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PELAKSANA	II/b-II/c-II/d	1
2	PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
3	PENYELIA	III/c-III/d	3

TPP JAFUNG TEKNIK PENGAIRAN KEAHLIAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PERTAMA	III/a-III/b	1
2	MUDA	III/c-III/d	2
3	MADYA	IV/a-IV/b-IV/c	3
4	UTAMA	IV/d-IV/e	4

TPP JAFUNG TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN KETERAMPILAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PELAKSANA	II/b-II/c-II/d	1
2	PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
3	PENYELIA	III/c-III/d	3

TPP JAFUNG TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN KEAHLIAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PERTAMA	III/a-III/b	1
2	MUDA	III/c-III/d	2
3	MADYA	IV/a-IV/b-IV/c	3
4	UTAMA	IV/d-IV/e	4

TPP JAFUNG TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN KETERAMPILAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PELAKSANA	II/b-II/c-II/d	1
2	PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
3	PENYELIA	III/c-III/d	3

TPP JAFUNG TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN KEAHLIAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PERTAMA	III/a-III/b	1
2	MUDA	III/c-III/d	2
3	MADYA	IV/a-IV/b-IV/c	3
4	UTAMA	IV/d-IV/e	4

TPP JAFUNG RADIOGRAFER KETERAMPILAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PELAKSANA	II/c-II/d	1
2	PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
3	PENYELIA	III/c-III/d	3

TPP JAFUNG ADMINISTRATOR KESEHATAN KEAHLIAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PERTAMA	III/a-III/b	1
2	MUDA	III/c-III/d	2
3	MADYA	IV/a-IV/b-IV/c	3

TPP JAFUNG APOTEKER KEAHLIAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PERTAMA	III/a-III/b	1
2	MUDA	III/c-III/d	2
3	MADYA	IV/a-IV/b-IV/c	3
4	UTAMA	IV/d-IV/e	4

TPP JAFUNG APOTEKER KETERAMPILAN			
NO	**JENJANG JABATAN *FUNGSIONAL***	**GOLONGAN/ *RUANG***	**KELIPATAN *TPP***
1	PELAKSANA PEMULA	II/a	1
2	PELAKSANA	II/b-II/c-II/d	2
3	PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	3
4	PENYELIA	III/c-III/d	4

TPP JAFUNG BIDAN KETERAMPILAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PELAKSANA PEMULA	II/a	1
2	PELAKSANA	II/b-II/c-II/d	2
3	PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	3
4	PENYELIA	III/c-III/d	4

TPP JAFUNG DOKTER KEAHLIAN			
NO	**JENJANG JABATAN *FUNGSIONAL***	**GOLONGAN/ *RUANG***	**KELIPATAN *TPP***
1	PERTAMA	III/b	1
2	MUDA	III/c-III/d	2
3	MADYA	IV/a-IV/b-IV/c	3
4	UTAMA	IV/d-IV/e	4

TPP JAFUNG DOKTER GIGI KEAHLIAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PERTAMA	III/b	1
2	MUDA	III/c-III/d	2
3	MADYA	IV/a-IV/b-IV/c	3
4	UTAMA	IV/d-IV/e	4

TPP JAFUNG EPIDEMIOLOG KESEHATAN KETERAMPILAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PELAKSANA PEMULA	II/a	1
2	PELAKSANA	II/b-II/c-II/d	2
3	PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	3
4	PENYELIA	III/c-III/d	4

TPP JAFUNG EPIDEMIOLOG KESEHATAN KEAHLIAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PERTAMA	III/b	1
2	MUDA	III/c-III/d	2
3	MADYA	IV/a-IV/b-IV/c	3

TPP JAFUNG ENTOMOLOG KESEHATAN KETERAMPILAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PELAKSANA PEMULA	II/a	1
2	PELAKSANA	II/b-II/c-II/d	2
3	PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	3
4	PENYELIA	III/c-III/d	4

TPP JAFUNG ENTOMOLOG KESEHATAN KEAHLIAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PERTAMA	III/a-III/b	1
2	MUDA	III/c-III/d	2
3	MADYA	IV/a-IV/b-IV/c	3

TPP JAFUNG NUTRISIONIS KESEHATAN KETERAMPILAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PELAKSANA	II/b-II/c-II/d	1
2	PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
3	PENYELIA	III/c-III/d	3

TPP JAFUNG NUTRISIONIS KESEHATAN KEAHLIAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PERTAMA	III/a-III/b	1
2	MUDA	III/c-III/d	2
3	MADYA	IV/a-IV/b-IV/c	3

TPP JAFUNG PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT KESEHATAN KETERAMPILAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PELAKSANA	II/b-II/c-II/d	1
2	PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
3	PENYELIA	III/c-III/d	3

TPP JAFUNG PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT KESEHATAN KEAHLIAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PERTAMA	III/a-III/b	1
2	MUDA	III/c-III/d	2
3	MADYA	IV/a-IV/b-IV/c	3

TPP JAFUNG PERAWAT KETERAMPILAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PELAKSANA PEMULA	II/a	1
2	PELAKSANA	II/b-II/c-II/d	2
3	PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	3
4	PENYELIA	III/c-III/d	4

TPP JAFUNG PERAWAT KEAHLIAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PERTAMA	III/a-III/b	1
2	MUDA	III/c-III/d	2
3	MADYA	IV/a-IV/b-IV/c	3

TPP JAFUNG PERAWAT GIGI KETERAMPILAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PELAKSANA PEMULA	II/a	1
2	PELAKSANA	II/b-II/c-II/d	2
3	PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	3
4	PENYELIA	III/c-III/d	4

TPP JAFUNG PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN KETERAMPILAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PELAKSANA PEMULA	II/a	1
2	PELAKSANA	II/b-II/c-II/d	2
3	PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	3
4	PENYELIA	III/c-III/d	4

TPP JAFUNG PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN KEAHLIAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PERTAMA	III/a-III/b	1
2	MUDA	III/c-III/d	2
3	MADYA	IV/a-IV/b-IV/c	3

TPP JAFUNG PEREKAM MEDIS KETERAMPILAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PELAKSANA	II/b-II/c-II/d	1
2	PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
3	PENYELIA	III/c-III/d	3

TPP JAFUNG SANITARIAN KETERAMPILAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PELAKSANA PEMULA	II/a	1
2	PELAKSANA	II/b-II/c-II/d	2
3	PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	3
4	PENYELIA	III/c-III/d	4

TPP JAFUNG SANITARIAN KEAHLIAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PERTAMA	III/a-III/b	1
2	MUDA	III/c-III/d	2
3	MADYA	IV/a-IV/b-IV/c	3

TPP JAFUNG MEDIK VETERINER KEAHLIAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PERTAMA	III/b	1
2	MUDA	III/c-III/d	2
3	MADYA	IV/a-IV/b-IV/c	3
4	UTAMA	IV/d-IV/e	4

TPP JAFUNG PARAMEDIK VETERINER KETERAMPILAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PELAKSANA	II/b-II/c-II/d	1
2	PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
3	PENYELIA	III/c-III/d	3

TPP JAFUNG PENGAWAS BENIH IKAN KETERAMPILAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PELAKSANA	II/b-II/c-II/d	1
2	PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
3	PENYELIA	III/c-III/d	3

TPP JAFUNG PENGAWAS BENIH IKAN KEAHLIAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PERTAMA	III/b	1
2	MUDA	III/c-III/d	2
3	MADYA	IV/a-IV/b-IV/c	3
4	UTAMA	IV/d-IV/e	4

TPP JAFUNG PENGAWAS BIBIT TERNAK KETERAMPILAN			
NO	**JENJANG JABATAN *FUNGSIONAL***	**GOLONGAN/ *RUANG***	**KELIPATAN TPP**
1	PELAKSANA	II/b-II/c-II/d	1
2	PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
3	PENYELIA	III/c-III/d	3

TPP JAFUNG PENGAWAS BIBIT TERNAK KEAHLIAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PERTAMA	III/a-III/b	1
2	MUDA	III/c-III/d	2
3	MADYA	IV/a-IV/b-IV/c	3

TPP JAFUNG PENGAWAS PERIKANAN KETERAMPILAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ *RUANG***	**KELIPATAN TPP**
1	PELAKSANA	II/b-II/c-II/d	1
2	PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
3	PENYELIA	III/c-III/d	3

TPP JAFUNG PENGAWAS PERIKANAN KEAHLIAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PERTAMA	III/a-III/b	1
2	MUDA	III/c-III/d	2
3	MADYA	IV/a-IV/b-IV/c	3
4	UTAMA	IV/d-IV/e	4

TPP JAFUNG PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN KETERAMPILAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PELAKSANA	II/b-II/c-II/d	1
2	PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
3	PENYELIA	III/c-III/d	3

TPP JAFUNG PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN KEAHLIAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PERTAMA	III/a-III/b	1
2	MUDA	III/c-III/d	2
3	MADYA	IV/a-IV/b-IV/c	3

TPP JAFUNG PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KETERAMPILAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PELAKSANA	II/b-II/c-II/d	1
2	PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
3	PENYELIA	III/c-III/d	3

TPP JAFUNG PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KEAHLIAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PERTAMA	III/a-III/b	1
2	MUDA	III/c-III/d	2
3	MADYA	IV/a-IV/b-IV/c	3

TPP JAFUNG PENGAWAS BENIH TANAMAN KETERAMPILAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PELAKSANA	II/b-II/c-II/d	1
2	PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
3	PENYELIA	III/c-III/d	3

TPP JAFUNG PENGAWAS BENIH TANAMAN KEAHLIAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PERTAMA	III/a-III/b	1
2	MUDA	III/c-III/d	2
3	MADYA	IV/a-IV/b-IV/c	3

TPP JAFUNG PENYULUH KEHUTANAN KETERAMPILAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PELAKSANA	II/b-II/c-II/d	1
2	PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
3	PENYELIA	III/c-III/d	3

TPP JAFUNG PENYULUH KEHUTANAN KEAHLIAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PERTAMA	III/a-III/b	1
2	MUDA	III/c-III/d	2
3	MADYA	IV/a-IV/b-IV/c	3

TPP JAFUNG PENYULUH PERTANIAN KETERAMPILAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PELAKSANA	II/b-II/c-II/d	1
2	PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
3	PENYELIA	III/c-III/d	3

TPP JAFUNG PENYULUH PERTANIAN KEAHLIAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PERTAMA	III/a-III/b	1
2	MUDA	III/c-III/d	2
3	MADYA	IV/a-IV/b-IV/c	3
4	UTAMA	IV/d-IV/e	4

TPP JAFUNG PEKERJA SOSIAL KETERAMPILAN			
NO	**JENJANG JABATAN *FUNGSIONAL***	**GOLONGAN/ *RUANG***	**KELIPATAN *TPP***
1	PELAKSANA PEMULA	II/a	1
2	PELAKSANA	II/b-II/c-II/d	2
3	PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	3
4	PENYELIA	III/c-III/d	4

TPP JAFUNG PEKERJA SOSIAL KEAHLIAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PERTAMA	III/a-III/b	1
2	MUDA	III/c-III/d	2
3	MADYA	IV/a-IV/b-IV/c	3

TPP JAFUNG PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN KETERAMPILAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PELAKSANA	II/b-II/c-II/d	1
2	PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
3	PENYELIA	III/c-III/d	3

TPP JAFUNG PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN KEAHLIAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PERTAMA	III/a-III/b	1
2	MUDA	III/c-III/d	2
3	MADYA	IV/a-IV/b-IV/c	3

TPP JAFUNG PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR KETERAMPILAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PELAKSANA PEMULA	II/a	1
2	PELAKSANA	II/b-II/c-II/d	2
3	PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	3
4	PENYELIA	III/c-III/d	4

TPP JAFUNG PENYULUH PERIKANAN KETERAMPILAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PELAKSANA PEMULA	II/a	1
2	PELAKSANA	II/b-II/c-II/d	2
3	PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	3
4	PENYELIA	III/c-III/d	4

TPP JAFUNG PENYULUH PERIKANAN KEAHLIAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PERTAMA	III/a-III/b	1
2	MUDA	III/c-III/d	2
3	MADYA	IV/a-IV/b-IV/c	3
4	UTAMA	IV/d-IV/e	4

TPP JAFUNG PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH KEAHLIAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PERTAMA	III/a–III/b	1
2	MUDA	III/c–III/d	2
3	MADYA	IV/a–IV/b–IV/c	3

TPP JAFUNG FISIOTERAPIS KETERAMPILAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PELAKSANA	II/c-II/d	1
2	PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
3	PENYELIA	III/c-III/d	3

TPP JAFUNG FISIOTERAPIS KEAHLIAN			
NO	**JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**	**GOLONGAN/ RUANG**	**KELIPATAN TPP**
1	PERTAMA	III/a–III/b	1
2	MUDA	III/c-III/d	2
3	MADYA	IV/a-IV/b-IV/c	3

2. Diantara Pasal 20D dan Pasal 21 disispkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 20E sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20E

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan–ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada :

a. Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 21);

b. Peraturan Bupati Bandung Nomor 34 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 34);

c. Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 7);

d. Peraturan Bupati Bandung Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 45); dan

e. Peraturan Bupati Bandung Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 35);

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 September 2012

BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 September 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOPIAN NATAPRAWIRA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19581229 198603 1 01

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012 NOMOR 45